

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Literatur Review

Literatur Reviu merupakan kerangka yang disusun oleh penulis untuk mengklrisifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari literatur reviu adalah untuk mendapatkan pemahamn terkait permasalahan yang dikaji. Dalam tulisan ini permasalahan yang akan dikaji adalah **Pengaruh kebijakan investasi asing terhadap Deforestasi di Amazon** yang akan diolah untuk memecahkan masalah yang diteliti disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relevan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, press realease, skripsi, dan berita-berita resmi. Beberapa literatur yang penulis rujuk karena keterkaitan dengan penulisan, diantaranya:

Literatur pertama, jurnal yang ditulis oleh **Kartika Yustika Mandala Putri** tahun 2016 dengan judul penelitian “*Diplomasi Greenpeace Dalam Menekan Deforestasi Amazon*”. Lebih menekankan pada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Greenpeace pada upaya melawan deforestasi yang terjadi di Amazon dengan upaya Moratorium kedelai yang disepakati oleh berbagai pihak yang bersangkutan dan melahirkan komitmen untuk membatasi produksi kedelai yang berasal dari Amazon. Tepatnya pada 24 Juni 2006, Moratorium Kedelai disepakati sebagai sebuah komitmen sukarela yang ditandatangani oleh industri dan para anggota eksportir Brazilian Vegetable Oil Industries Association (ABIOVE) dan National

Grain Exporters Association (ANEC). Tidak hanya disetujui secara sukarela oleh sektor-sektor swasta, inisiatif ini juga didukung oleh Pemerintah Brazil dan kelompok masyarakat sipil (FAO, t.t).

Ada tiga peran yang signifikan dari Greenpeace. Peran pertama Greenpeace adalah sebagai kompetitor intelektual bagi pemerintah Brazil. Semangat Greenpeace untuk menyuarakan permasalahan deforestasi di hutan Amazon bukan berarti pemerintah Brazil tidak melakukan kebijakan terkait deforestasi. Pada tahun 2004 diluncurkan sebuah kebijakan oleh Pemerintah Brazil, yaitu Rencana Tindakan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penebangan Hutan di Legal Amazon (PPCDAm), Kebijakan Pemerintah Brazil tersebut lebih berfokus pada kekuatan yang berpusat dari negara, tanpa adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan terhadap permasalahan deforestasi yang menimpa Amazon di Brazil. Greenpeace menilai kebijakan ini kurang bisa menghalangi deforestasi, dengan landasan ini Greenpeace melakukan pendekatan yang berbeda untuk menghambat laju deforestasi. Respon yang dikeluarkan oleh Greenpeace tidak berbentuk protes, melainkan berbentuk laporan investigasi. Greenpeace melihat urgensi pelestarian Amazon agar mendapatkan perhatian melalui fakta-fakta bahwa Amazon sedang dalam keadaan yang berbahaya. Selain itu peran-peran lebih lanjut Greenpeace melakukan mobilisasi opini publik. Greenpeace merupakan salah satu NGO yang aktif melakukan kampanye. Melalui media rilisnya, Greenpeace menyampaikan untuk terus memperjuangkan Zero Deforestation agar dapat mencegah perubahan iklim katastrofik serta Peran Greenpeace yang ketiga adalah sebagai pengawas negosiasi moratorium kedelai dan kepatuhan pemerintah dalam pelestarian hutan Amazon. Hal-hal yang dilakukan adalah dengan mengawasi luas hutan dan

melibatkan masyarakat lokal yang digerakkan oleh Greenpeace berdasarkan asas self-belonging. Greenpeace memiliki pengaruh dalam Moratorium Kedelai di Brazil. Dengan menggunakan teori tingkat pengaruh dari Betsill, terbukti terjadi perubahan kondisi dalam setiap indikator pembentukan isu dan agenda, indikator proses negosiasi, dan indikator hasil. Adanya perubahan perilaku aktor lain akibat aktivitas Greenpeace, menandakan bahwa Greenpeace berpengaruh dalam pengurangan deforestasi di Amazon.

Selanjutnya jurnal yang berjudul **“Bolsonaro and Brazil’s Iliberal Backlash”** yang ditulis oleh **Wendy Hunter** dan **Timothy J. Power** pada tahun 2019 perihal kondisi ekonomi politik di Brazil pada tahun 2018 yang mana sedang terjadi krisis di Brazil dari berbagai sektor dan sering disebut dengan “perfect resesion”. Brazil dinilai sedang menghadapi krisis yang setidaknya distimulus oleh empat krisis yaitu, krisis resesi ekonomi, krisis kepercayaan masyarakat terhadap politik, krisis korupsi, dan krisis perihal lingkungan. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi politik Brazil yang mendorong kriminalitas meninggi di masyarakat. Jurnal ini menilai bahwa kondisi yang tidak stabil di Brazil yang memfasilitasi kemenangan Bolsonaro pada 28 Oktober 2018 yang mana Bolsonaro dalam posisi jauh dari isu korupsi,serta Bolsonaro memanfaatkan media sosial dan gereja untuk mengorganisir pengikutnya. Untuk meyakinkan masyarakat Bolsonaro hadir dengan isi kampanye yang mengutarakan cita-cita Brazil dalam ekonomi yang salah satunya membuka ruang Amazon demi kepentingan ekonomi Brazil yang diselaraskan dengan cita-cita Brazil dalam memanfaatkan permintaan komoditas agrikultur global. Lebih dari itu Bolsonaro menggaungkan slogan kampanye “Law

and order” dan anti korupsi untuk mengayomi masyarakat yang telah tidak percaya pada politik Brazil karena krisis korupsi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “**Bolsonaro and the Prospects for Reform in Brazil**” ditulis oleh **Manrukh Doctor** pada tahun 2019. Jurnal ini mengawali pembahasannya dengan memperlihatkan krisis ekonomi dan politik yang dialami oleh Brazil dengan isu-isu yang mendorong Bolsonaro yang dikenal sebagai “*Tropical Trump*” memenangi pemilu tahun 2018. Pesan keras anti korupsi dan “*Tough on Crime*” beresensansi secara kuat dengan para pemilihnya. Jurnal ini mengindikasikan pandangan Bolsonaro yang lemah terhadap isu proteksi lingkungan dan jauh dari pelestarian penduduk asli dan tanah mendapat dukungan dari bagian agribisnis dan ekonomi pedesaan tertentu. Penguatan narasi dari lemahnya pandangan Bolsonar terhadap isu lingkungan diperkuat oleh kampanye-kampanye Bolsonaro yang berjanji menghindari perundingan politik gaya lama, dengan tegas Bolsonaro berjanji akan melembagakan kebijakan ekonomi yang ramah pasar yang didorong oleh dukungan pengusaha nasional maupun internasional. Jurnal ini mengemukakan bahwa isu lingkungan di Brazil terutama di Amazon dengan naiknya Bolsonaro sebagai presiden akan menjadikan isu internasional, selain itu hal ini juga akan berimplikasi terhadap daya saing Brazil di pasar komoditas, terutama komoditas pertanian.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah proses penelitian, tentu diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Maka dari itu, dalam melakukan pengamatan dan analisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan teori atau pun konseptual yang relevan.

Kepentingan nasional adalah pijakan utama dalam penelitian ini. Kepentingan nasional adalah ambisi negara untuk mendapatkan keuntungan baik di bidang ekonomi, militer, teknologi ataupun budaya. Dalam arus utama studi Hubungan Internasional, konsep ini penting karena menjadi landasan bagi negara agar dapat memperoleh keuntungan dan bahkan dapat memberi pengaruhnya di tatanan internasional. Argumentasi Machiaveli mengenai kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoretis studi Hubungan Internasional seperti Morgenthau, Mearsheimer dan lain-lain. Kepentingan nasional biasanya dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan strategis suatu negara.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional terdiri dari dua elemen, yaitu, pertama, didasarkan pada pemenuhan sendiri atau kebutuhan dalam negeri dan kedua, mempertimbangkan lingkungan strategis di sekitarnya (*environmental external*) agar pemenuhan kepentingan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara mempertahankan kedaulatan wilayah negara, stabilitas politik dalam negeri, dan menjaga identitas budaya dari ancaman negara lain (Husna 2012).

Dengan pertimbangan lingkungan strategis dari faktor yang mempengaruhi disekitarnya (*environmental external*) menjadikan kepentingan nasional

bersinggungan dengan faktor diluar batas teritorinya dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk kemajuan suatu negara baik politik maupun ekonomi. Dalam segi ekonomi suatu negara tidak akan terpisahkan dengan perdagangan internasional yang termasuk faktor yang dominan dalam mempengaruhi kepentingan nasional.

Perdagangan internasional merupakan bentuk lain dari kegiatan ekonomi yang bersifat lintas batas negara. Dalam perspektif liberalisme, kegiatan ekonomi sudahlah pasti berorientasi pasar (mengikuti mekanisme pasar). Robert Gilpin menjelaskan tiga karakteristik ekonomi pasar yang bersifat dinamis. Pertama, peran kritis harga relatif dalam pertukaran barang dan jasa. Kedua, sentralitas persaingan sebagai penentu perilaku individu dan kelembagaan. Ketiga, pentingnya efisiensi dalam menentukan keberlangsungan pelaku ekonomi. Berdasarkan ketiga hal tersebut, terdapat konsekuensi mendalam dari mekanisme pasar untuk kehidupan ekonomi, sosial, dan politik (Gilpin 1987).

Salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan pada perdagangan internasional hari ini adalah investasi asing. Investasi asing memainkan peran penting dalam proses perdagangan internasional dengan didorong oleh globalisasi yang menghasilkan pengintegrasian negara-negara dunia. Selain itu, investasi menjadi sebuah keniscayaan sekaligus jawaban negara dalam dalam rangka membangun perekonomian dalam negeri. Terlebih negara penerima investasi berasal dari negara dunia ketiga, yang belum berhasil membangun fondasi capital formation yang kuat dan stabil. Investasi beriringan dengan muncul dan berkembangnya perusahaan multinasional terutama dalam bidang ekonomi.

Sebagaimana penuturan Robert Gilpin: Investasi asing Langsung umumnya merupakan bagian integral dari strategi perusahaan global untuk perusahaan yang beroperasi di pasar oligopolistik, investasi asing langsung ditentukan oleh pertumbuhan dan strategi kompetitif perusahaan oligopolistik (Gilpin 1987). Lanjut, Gilpin menulis bahwa motivasi utama atas investasi ini adalah untuk memanfaatkan nilai produksi yang lebih rendah dan keuntungan pajak dari pajak daerah (Gilpin 1987).

Di negara dunia ketiga biasanya laba yang bisa diperoleh tinggi, karena kapital tidak banyak disana, harga tanah relatif rendah, upah rendah, bahan baku murah, kemungkinan masuk investasi ke negara dunia ketiga diciptakan oleh kenyataan bahwa, negara terbelakang ini sudah terseret ke dalam disiplin pasar dalam kapitalis dunia (Lenin 1917).

Konsekuensi logis investasi asing adalah pengaruhnya terhadap nilai-nilai ekologi yang dengan praktek perdagangan terkhususnya praktek proses produksi tentunya mencakup perihal nilai ekologi baik itu berupa bahan material bagi suatu komoditas ataupun sebagai lahan yang sedari dulunya mengandung nilai ekologi diaktivasi oleh manusia untuk aktifitas produksi demi terpenuhinya kebutuhan permintaan pasar dan surplus yang tak hingga.

Sebagaimana Foster mengejawantahkan perihal asimetri kemajuan ekonomi kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mendominasi hampir semua sudut dunia selalu berbanding terbalik dengan kelangsungan kelestarian nilai ekologi yang mana adalah fondasi keseimbangan kehidupan di planet bumi. Foster menuding sistem ekonomi yang kapitalistik mengakibatkan berbagai macam problem sosial-

ekologis (Magdoff and Foster 2018). Ditambah lagi skema perdagangan baru abad 21 yang didorong oleh globalisasi produksi yang memfasilitasi arus barang menjadi lebih cepat dan efisien daripada perdagangan sebelumnya yang pada akhirnya mempercepat pengaruh negatifnya terhadap sosial-ekologis.

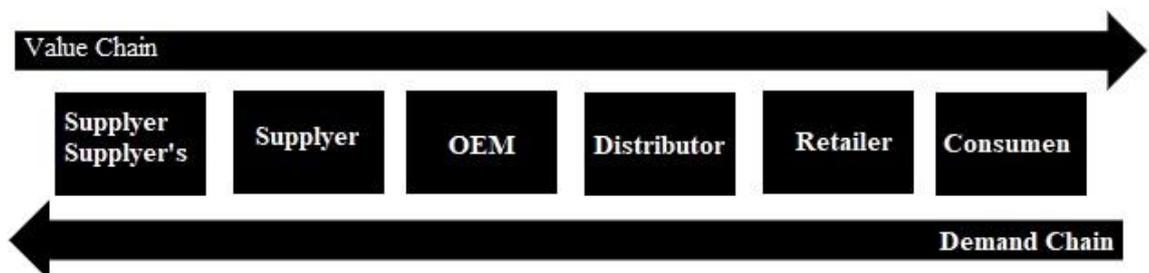
Pada dekade 1990an, maka globalisasi dalam industri telah mengalami transformasi yang sangat cepat dan mendasar. Hal ini seiring dengan terjadinya revolusi industri di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sering disebut sebagai *tekno ekonomi*. Sistem globalisasi industri baru ini disebut dengan Rantai Pasokan Global/RPG (Global Supply Chain/GSC) atau nama lainnya adalah Rantai Nilai Global/RNG (Global Value Chain/GVC). Dengan adanya skema baru dalam industrialisasi ini maka sistem industrial dan pasokan global berada dalam reorganisasi yang mendasar di bidang manufaktur, perdagangan dan jasa-jasa di dalam sistem lintas global (Setiawan 2014)

Rantai Nilai menjelaskan keseluruhan cakupan kegiatan yang dengannya barang dan jasa beredar dari sejak konsepsinya sampai kepada distribusinya dan seterusnya. Ini termasuk beberapa kegiatan seperti desain, produksi, pemasaran, distribusi dan dukungan sampai ke konsumen akhir. Semua kegiatan ini dapat dilakukan di perusahaan tunggal atau dibagi kepada beberapa perusahaan yang berbeda-beda; kegiatan ini dapat dilakukan dalam wilayah geografis yang tunggal atau disebar ke wilayah-wilayah lain yang lebih luas. Rantai Nilai Global (RNG) adalah rantai kegiatan yang dibagi kepada berbagai perusahaan dalam lokasi geografis yang berbeda. RNG mencakup rentang penuh kegiatan-kegiatan produksi yang saling berkaitan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dalam wilayah geografis yang berbeda untuk menghasilkan produk atau jasa dari sejak

konsepsinya sampai produksi komplit dan penyerahanya kepada konsumen akhir. Sementara Rantai Pasokan Global (RPG) didefinisikan sebagai arus material dan produk-produk melalui proses pembelajaran, produksi, pergudangan, distribusi dan pembuangan. Reorganisasi produksi secara global ini menciptakan pembagian kerja yang lebih baru lagi di dunia, yang memadukan sejumlah besar kekuatan-kekuatan kerja yang beragam dan terpisah secara ruang, yang menjalankan tugas-tugas yang terbagi-bagi secara spesifik dan yang terkait dengan proses yang lebih besar melalui berbagai bentuk organisasi sosial mulai dari kontrol birokratis perusahaan-perusahaan multinasional, pertukaran-pertukaran pasar, jaringan sosial perusahaan subkontrak, serta jaring rumit keuangan yang memfasilitasi arus kompleks dari barang-barang, uang dan informasi (Setiawan 2014).

Rantai pasok dapat bersifat lokal atau cakupannya hanya domestik saja, namun dapat juga berskala global. Inilah yang disebut oleh Dawei Lu sebagai *global supply chain* yaitu ketika rantai pasok ini saling berjejaring dengan *multinational corporation* dalam skala global, tentunya akan memberikan efisiensi produksi bahkan biaya produksi dapat ditekan menjadi lebih murah melalui *international division of labour*.

Berikut merupakan skema rantai pasok dari Dawei Lu:



Di dalam rantai pasok pasti terdapat *value chain* sebagai pertambahan nilai suatu komoditas agar menjadi suatu *best quality product*. Rentetan ini berawal dari *supplier's supplier* sebagai penyedia bahan dasar (*raw material*) yang kemudian dilanjutkan ke *supplier* untuk mengumpulkan bahan-bahan dasar tersebut agar bisa diproduksi di OEM (*Original Equipment Manufacturer*) dan didistribusikan oleh distributor ke retailer sebagai *market place* hingga sampai ke tangan konsumen. Ini menjelaskan bahwa di dalam rantai pasok pasti terdapat *material flow*, *information flow*, *finance flow* dan *commercial flow* (Lu 2011).

Globalisasi jaringan produksi abad 21 serta watak kapital/modal yang ekspansionis tentunya akan menyasar dataran yang rendah nilai dengan lebih cepat demi tercapainya keuntungan yang tak hingga, hal ini akan menyasar para pemasok di negara-negara berkembang. Pemasok-pemasok dari negara berkembang dalam produk padat karya kini tidak hanya menghadapi hambatan perdagangan internasional, akan tetapi kini mereka juga harus menjadi bagian dari beberapa jaringan perdagangan agar dapat melakukan ekspor. Meningkatnya rantai pasokan dewasa ini yang menjadi motor dari perdagangan internasional, menciptakan sebuah situasi yang secara mendasar disebut *monopsoni*, dimana para pembeli asing kini kurang lebihnya telah mendikte harga yang mereka bayar kepada produsen di negara-negara berkembang. Dalam jaringan perdagangan seperti ini maka para pembeli hanya mempunyai sedikit komitmen kepada para pemasoknya, karena dengan mudah bisa digantikan oleh pemasok lain. Demikian pula meskipun para produsen di negara berkembang telah masuk dalam sebuah jaringan perdagangan, maka tidak ada jaminan akan bisa bertahan lama, karena pemasok-pemasok baru yang lebih menguntungkan akan terus berdatangan. Akibatnya adalah semacam

*race to the bottom* (berlomba ke paling bawah) (Haque, 2007). Konsekuensi logis dari hal ini adalah para produsen pasokan terpaksa mengurangi mengabaikan konsekuensi perusakan lingkungan yang tentunya akan menjadi masif dengan didorong oleh stimulus kompetisi antar jaringan produksi serta kuantitas lainnya yang mendukung perihal perusakan lingkungan seperti halnya peledakan penduduk, teknologi yang lebih canggih dan hal lainnya.

Secara gamblang paparan diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai ekologi sangatlah tidak dipandang sebagai nilai yang mampu menjaga kelangsungan fondasi kehidupan di planet ini. Dengan landasan monopoli oleh MNC maka perputaran kapital dalam sistem kapitalisme akan terus mengejar surplus yang tak hingga dalam dunia yang terbatas, Selaras dengan logika kapitalisme yaitu akumulasi. Terdapat dua hal kunci dari kapitalisme yaitu: pertama, kekuatan penggerak dan motivasi kapitalisme adalah pengejaran laba dan akumulasi tanpa batas. Kedua, karena persaingan, perusahaan terdorong untuk terus-menerus menambah penjualan dan melebarkan pangsa pasar (Magdoff and Foster 2018).

Perusahaan multinasional semenjak perang dunia ke II berakhir mulai marak bermunculan dengan didorong oleh kuantitas yang mendukung degradasi lintas batas antar negara seperti halnya globalisasi yang membuat perusahaan multinasional lebih mudah berekspansi ke teritorial baru yang lebih menguntungkan demi membuka pasar baru dan mendapatkan bahan pasokan baru demi efisiensi produksi dalam perusahaannya. Adapun definisi dari Robert Gilpin mengenai perusahaan multinasional (MNC):

*“A simple working definition of a multinational corporation is a firm that owns and manages economic units in two or more countries”*(Gilpin 1987).

Definisi menurut Gilpin lebih mengutarakan mengenai syarat perihal perusahaan multinasional yaitu wajib memiliki mengelola unit ekonomi di dua negara atau lebih. seringkali, MNC memerlukan investasi asing langsung oleh sebuah perusahaan dan kepemilikan unit ekonomi (jasa, industri ekstraktif, atau pabrik) di beberapa negara. Investasi langsung semacam itu (berbeda dengan investasi portofolio) berarti perluasan kontrol manajerial melintasi batas-batas nasional. MNC cenderung menjadi perusahaan oligopolistik di mana kepemilikan, manajemen, produksi, dan kegiatan penjualan meluas ke beberapa yurisdiksi nasional. MNC terdiri dari kantor pusat di satu negara dengan sekelompok anak perusahaan di negara lain. Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk mengamankan produksi barang yang paling murah untuk pasar dunia; tujuan ini dapat dicapai melalui perolehan lokasi yang paling efisien untuk fasilitas produksi atau memperoleh konsesi perpajakan dari pemerintah setempat (Gilpin 1987).

Penegasan Gilpin diatas tentunya beririsan dengan kebutuhan lahan untuk pemenuhan tujuan dari perusahaan multinasional (MNC) lewat perolehan lokasi yang paling efisien untuk fasilitas produksi. Ini menandakan bahwa lokasi atau lahan tidak dinilai sebagai hal yang bernilai bagi kelangsungan kehidupan, namun dinilai hanya sebagai prasarana untuk mencapai surplus yang tak hingga. Dengan fokus analisis berlandaskan kepada kritik terhadap kapitalisme menjadikan kapital/modal akan terus berekspansi ke ranah yang lebih rendah nilai untuk terus berputar menghasilkan superprofit bagi perusahaan-perusahaan besar seperti halnya para perusahaan multinasional sekaligus memperkecil kecenderungan over surplus

yang bisa menjadikan krisis. Hal ini selaras dengan penjelasan dari teori Harvey yaitu *Spatio temporal fix* mengenai akumulasi yang mengalami transformasi ke perluasan lintas batas yang melahirkan jaringan yang semakin besar, dan cara ini adalah sarana efektif untuk memperlambat sistem kapitalisme terjatuh lagi kedalam krisis yang terus dibawanya.

Inti argumen dari teori ini terkait tendensi kronis dalam kapitalisme dan secara teoritis berangkat dari reformulasi teori Marx mengenai tendensi kejatuhan tingkat laba untuk menciptakan krisis overakumulasi. Krisis semacam itu biasanya ditandai dengan terjadinya surplus kapital (dalam bentuk komoditi, uang, atau kapasitas produksi) dan surplus kekuatan tenaga kerja yang mengiringinya, dibarengi dengan ketiadaan cara-cara untuk menggunakan surplus itu secara menguntungkan (Harvey 2010).

Teori ini tentunya bertopang kepada teori umum Marx perihal akumulasi kapital dibangun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang secara luas menantang asumsi dasar teori ekonom klasik. Asumsi-asumsi ekonom klasik ialah: pasar persaingan yang berfungsi secara bebas dengan tatanan-tatanan institusional hak milik pribadi, individualisme yang diakui hukum, kebebasan kontrak, dan struktur hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang cocok yang dijamin oleh suatu negara fasilitatif yang juga melindungi integritas uang sebagai penyimpanan nilai dan sebagai medium pertukaran.

Akumulasi awal telah berlangsung dan akumulasi berjalan berbarengan dengan perluasan reproduksi (melalui eksploitasi buruh dalam produksi) di dalam kondisi perdamaian, kemakmuran dan kesetaraan. Marx memprediksi, hal tersebut

akan menciptakan ketidakstabilan yang serius dan ketidakstabilan itu meningkat sehingga memuncak dalam bentuk krisis overakumulasi yang bersifat kronis (Harvey 2010). Harvey memutakhirkan akumulasi awal yang digagas oleh Marx dengan menggabungkan dengan unsur-unsur kuantitas terbaharu pada abad-21 dengan sebutan Akumulasi Lewat Penjarahan (Accumulation by despossession).

Akumulasi lewat penjarahan memperlihatkan bahwa akumulasi yang bersifat koersif dibutuhkan ketika surplus berlebih dan dalam keadaan tidak menguntungkan, seperti halnya Harvey mengutarakan bahwa:

*“Perlu diingat Overakumulasi merupakan suatu kondisi dimana surplus-surplus kapital berada dalam keadaan menganggur tanpa ada saluran-saluran yang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa dilakukan oleh akumulasi lewat penjarahan ialah melepaskan sejumlah aset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang sangat rendah (dan dalam beberapa kasus dengan tanpa biaya). Kapital yang mengalami overakumulasi bisa menguasai aset-aset semacam itu dan dengan segera mengubah arah pemanfaatan yang menguntungkan. Dalam kasus akumulasi primitif seperti dilukiskan oleh Marx, proses tersebut membutuhkan pengambilalihan tanah, atau penguasaan tanah, dan memaksa penduduk yang tinggal ditanah tersebut untuk menjadi kaum proletar tanpa tanah, dan kemudian melepaskan tanah itu kedalam arus akumulasi kapital yang privat” (Harvey 2010).*

Lewat logika akumulasi lewat penjarahan memperlihatkan dengan keterkaitan overakumulasi kapital dalam sistem kapitalis dan pencegahannya

terhadap krisis serta memperbesar bisnisnya dengan cara-cara koersif dari yang dilegalkan hingga yang ilegal. Hal ini mencerminkan akumulasi kapitalisme mutakhir dengan unsur kuantitas terbaharu di abad-21 membuat ketersinggungan antara modus produksi dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ekologi, terutamanya dengan lahan yang dialih fungsikan menjadi kepemilikan privat dan dijadikan komoditas.

Hal ini pun mengindikasikan perihal kebutuhannya terhadap legalitas dan legitimasi hukum yang ramah terhadap iklim kapital dan menjadikan pencaplokan lahan komunal menjadi lahan privat sebagai tindakan yang dibenarkan. Korelasinya dengan kasus Brazil adalah dimana dengan secara sistematis kepentingan negara perihal ekonomi berbarengan dengan kepentingan kapitalistik (MNC) yang mana menghasilkan efek destruktif berupa legalisasi dan permudahan pembukaan lahan di Amazon untuk kepentingan ekspansi ekonomi dan perluasan peternakan serta perkebunan yang meningkatkan level deforestasi di 2019.

Deforestasi menurut KBBI adalah penebangan hutan, deforestasi merupakan gambaran nyata dari perubahan lingkungan global. Laju deforestasi yang sangat tinggi di hutan-hutan tropis telah berdampak besar terhadap perubahan iklim, punahnya keanekaragaman hayati, banjir, terjadinya pelumpuran dan degradasi tanah. Lebih lanjut, deforestasi mengancam kehidupan serta integritas budaya dari masyarakat yang bergantung pada hutan dan persediaan hasil hutan kayu dan non-kayu untuk generasi mendatang.

Penggunaan istilah ‘deforestasi’ sangat beragam, oleh sebab itu penting untuk memiliki definisi yang tepat. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization – FAO) menggunakan dua parameter yang berbeda dalam mendefinisikan deforestasi. Pertama, berdasarkan penggunaan lahan, deforestasi didefinisikan sebagai konversi lahan hutan untuk penggunaan lain. Kedua, berdasarkan tutupan tajuk, deforestasi didefinisikan sebagai penurunan jangka panjang tutupan tajuk di bawah ambang 10 persen (Kanninen et al. 2009).

Dengan kurangnya konsensus yang ada perihal faktor yang paling dominan antara para antropologis, para ahli biologi, para pemangku kebijakan dan para ahli teknologi untuk merumuskan faktor utama terhadap deforestasi. Kompleksitas dari faktor yang mendorong deforestasi ini menghasilkan upaya yang berbeda-beda dan tidak jarang menghasilkan perdebatan. Ahli ekologi William Laurance berupaya untuk mensimplikasi dan menunjukkan faktor yang paling dominan untuk deforestasi yang ada dalam ruang dan waktunya serta kuantitas yang membangun deforestasi pada zamannya yaitu 1999, dia merumuskan perihal empat faktor yang saling merasuki satu sama lain dan cenderung menghasilkan deforestasi yaitu masalah perihal populasi, kebijakan negara yang lemah dalam melindungi hutan (dipengaruhi oleh kepentingan atas ekonomi politik domestik dan internasional), logging (penebangan hutan), serta liberalisasi perdagangan yang didorongkan oleh era globalisasi yang mewakili percepatan akumulasi perdagangan dan arus modal kepada ruang-ruang yang menguntungkan.

Perihal populasi Laurance menilai bahwa, peningkatan populasi bisa menghasilkan singgungan langsung dengan deforestasi. pertumbuhan penduduk dapat mendorong deforestasi karena berpotensi memperburuk berbagai faktor ekonomi mikro dan ekonomi makro, seperti membuat kegagalan pasar yang lebih

parah, mengurangi pendapatan per kapita, mengubah pasar tenaga kerja, dan meningkatnya kebutuhan konsumsi saat ini (Laurance 1999).

Perihal lembaga yang lemah dan kebijakan yang buruk. Salah satu masalah kronis adalah lemahnya penegakan undang-undang untuk melindungi hutan tropis dan implementasinya yang kurang konsisten serta tidak diaplikasikan secara menyeluruh menjadikan salah satu faktor yang mendorong deforestasi (Laurance 1999).

Perihal liberalisasi perdagangan. Laurance merelevansikan dengan situasinya pada tahun 1999 kala liberalisasi masive mendisiplinkan pasar di negara dunia ketiga. *“Kita hidup di era globalisasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan liberalisasi perdagangan dan perjanjian perdagangan bebas internasional seperti NAFTA (Amerika Utara Perjanjian Perdagangan Bebas) mempromosikan investasi asing yang lebih besar dalam industri sumber daya ekstraksi tropis”* (Laurance 1999).

Terakhir perihal Logging, Tantangan besar yang dihadapi logging tropis saat ini adalah bahwa tekanan konversi meningkat di seluruh dunia berkembang sebagai pengaruh dari populasi manusia yang terus berkembang. Logging akan terus menjadi masalah sangat besar penting dalam konservasi hutan tropis. Di seluruh dunia, sekitar 80% dari penebangan tropis terjadi di hutan asri (Laurance 1999).

Dari ke empat faktor yang diutarakan oleh Laurance tentunya Brazil memiliki ke empat faktor yang mendorong deforestasi ke Amazon, perihal populasi Di antara negara-negara Amazon, ukuran populasi penduduk menjelaskan sekitar

2/3 peningkatan populasi memberikan sumbangsih terhadap tingkat rata-rata kerusakan hutan (Laurance, 1998). Banyak (tetapi tidak semua) studi empiris telah menyimpulkan bahwa berbagai langkah dari kepadatan penduduk atau pertumbuhan adalah prediktor penting dari deforestasi pada skala nasional atau regional terutama di Brazil. Perihal lemahnya undang-undang perlindungan lingkungan tentunya Brazilpun mengalami masalah kronis ini terutama di perbatasan Amazon. IBAMA, hanya memiliki 80 inspektur lingkungan ke polisi hutan Amazon-nya. Meskipun perbaikan baru-baru ini, masih ada kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan lebih lanjut di Brasil, hal ini pun ditambahkan oleh adanya kebijakan pro agribisnis baru yang dikemukakan oleh Jair Bolsonaro yang mana akan berimplikasi terhadap perluasan produksi pertanian dan peternakan ke Amazon (Greenpeace 2019) Peternakan skala besar misalnya, adalah penyebab paling penting dari deforestasi di Amazon Brazil, yang dibuka lewat tatacara liberalsasi pasar dan katalisnya yaitu globalisasi yang memfasilitasi investasi berupa perusahaan multinasional (MNC) mendominasi monopoli peternakan dan pertanian di daerah Amazon seperti di Mato Grosso, Cerado dan sebagainya. Dominasi monopoli komoditas tani maupun ternak pada 2019 didominasi oleh MNC dari Amerika Serikat sepertihalnya Archer Daniel Midland (ADM), Bunge, Cargill. Perusahaan multnasional ini lah yang memberikan sumbangsih terhadap deforestasi lewat kemudahan secara sistematis dari lemahnya penegakan undang-undang perihal peraturan perlindungan hutan tropis Amazon di era Bolsonaro (Greenpeace 2019).

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan literatur reuiu dan kajian konseptual yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan hipotesis masalah berupa: Jika kebijakan pembukaan akses pertanian dan peternakan ke hutan tropis Amazon berupa legalisasi hutan yang telah mengalami deforestasi secara ilegal oleh kepentingan investasi asing dimplementasikan maka akan berdampak pada meningkatnya deforestasi di Amazon dengan indikator kebakaran hutan Amazon.

### 2.4 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Implementasi kebijakan pembukaan akses pertanian dan peternakan ke hutan tropis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan Bolsonaro tentang Amazon.</li> <li>2. Kampanye Bolsonaro tentang pembukaan daerah di Amazon untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bolsonaro: "I'll save Amazon rainforest by giving it to corporations" Sumber: <a href="https://www.peoplesworld.org/article/bolsonaro-government-says-it-will-save-amazon-by-opening-it-to-corporate-interests/">https://www.peoplesworld.org/article/bolsonaro-government-says-it-will-save-amazon-by-opening-it-to-corporate-interests/</a>.</li> <li>2. Bolsonaro dan para menterinya, sejak awal, mengumumkan bahwa mereka berniat untuk membuka daerah-daerah yang diperuntukkan bagi 900.000 komunitas adat Amazon Brasil untuk dieksploitasi oleh kepentingan pertanian dan pertambangan perusahaan</li> </ol>

	<p>kepentingan pertanian.</p> <p>3. Permudahan akses izin lingkungan untuk kegiatan ekonomi di Amazon</p>	<p>Sumber:</p> <p><a href="https://www.peoplesworld.org/article/bolsonaro-government-says-it-will-save-amazon-by-opening-it-to-corporate-interests/">https://www.peoplesworld.org/article/bolsonaro-government-says-it-will-save-amazon-by-opening-it-to-corporate-interests/</a>.</p> <p>3. Bolsonaro telah mengadvokasi penghapusan hambatan lingkungan untuk kegiatan ekonomi di Amazon. Itu bisa membuka area baru hutan untuk pertanian.</p> <p>Sumber:</p> <p><a href="https://www.climatechangenews.com/2018/11/08/us-funds-big-amazon-farming-stakes-face-bolsonaro-choice/">https://www.climatechangenews.com/2018/11/08/us-funds-big-amazon-farming-stakes-face-bolsonaro-choice/</a></p>
<p>Variabel Terikat: berpengaruh terhadap deforestasi di hutan tropis Amazon.</p>	<p>1. Meningkatnya deforestasi dibandingkan tahun sebelumnya.</p>	<p>1. Pada bulan pertama setelah pemilihannya, deforestasi meningkat lebih dari 400 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya</p> <p>Sumber : Greenpeace ”<i>Under Fire: How demand for meat and dairy is driving violence against communities in Brazil</i>” 2019.</p>

## 2.5 Skema Operasionalisasi Variabel Hipotesis

